

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DI PROVINSI BANTEN

Alkadri

Pusat Pengkajian Kebijakan Peningkatan Daya Saing, BPPT
JL. MH Thamrin No. 8, Jakarta
E-mail : alek5766@yahoo.co.id

Abstract

In recent years, the competitiveness of Banten Province in the national level tends to decrease. This is indicated by several macroeconomic indicators, i.e economic growth rate, share of investment, share of exports, unemployment rate and real income per capita. To enhance its competitiveness back, Banten Province will develop Special Economic Zones (SEZ). The area is chosen to be the location of SEZ is Bojonegara region. To make Bojonegara as SEZ, it must be pursued various policies, i.e the policy regarding the development of leading industries, the development of a competitive infrastructure, institutional formation of SEZ Bojonegara, human resource development and the promotion and dissemination. With the SEZ Bojonegara, expected some macroeconomic indicators above can be improved, which in turn can improve the competitiveness of Banten Province on the national and international level.

Kata kunci : kebijakan, kawasan ekonomi khusus, Provinsi Banten

1. PENDAHULUAN

Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, hasil pemekaran dari Provinsi Jawa Barat. Provinsi ini memiliki luas 9.018,64 km² (BPS Provinsi Banten, 2008:3) yang terhampar di empat kabupaten (Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang) dan empat kota (Tangerang, Cilegon, Serang, Tangerang Selatan). Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, penduduk Provinsi Banten berjumlah 10.644.030 jiwa, atau 4,48% dari total penduduk Indonesia (237.556.363 jiwa) (BPS, 2010a:8,14). Dengan demikian, tingkat kepadatan penduduk di provinsi ini adalah 1.180 jiwa per km². Selama periode 2000-2010, laju pertumbuhan penduduk Provinsi Banten rata-rata 2,79% per tahun, jauh di atas laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang hanya 1,49% setahun (BPS, 2010a:10).

Provinsi Banten terletak di ujung Barat Pulau Jawa. Posisi ini menjadikan Banten sebagai penghubung utama untuk jalur distribusi barang dan penumpang antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Selain itu, Banten juga berbatasan langsung dengan DKI Jakarta yang merupakan Ibu Kota Negara RI, sehingga provinsi ini juga berperan sebagai bagian dari sirkulasi perdagangan internasional serta menjadi lokasi aglomerasi perekonomian dan permukiman.

Meskipun memiliki posisi strategis, namun daya saing Provinsi Banten di tingkat nasional masih di

bawah beberapa provinsi lain di Indonesia. Hal ini diindikasikan oleh beberapa indikator ekonomimakro berikut.

Pertama, selama periode 2001-2009, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten rata-rata 5,20% per tahun, masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang rata-rata 5,82% setahun untuk jangka waktu bersamaan. Lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional mengisyaratkan bahwa daya saing provinsi ini dalam menciptakan nilai tambah masih rendah. Bahkan, dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonominya cenderung terus menurun, yakni dari 6,04% (2007) menjadi 5,82% (2008) dan 4,55% (2009) (BPS Provinsi Banten, 2010:1; BPS, 2010b:1; BPS, beberapa seri).

Kedua, meskipun nilainya meningkat selama periode 2006-2009 (dari Rp3.815 miliar menjadi Rp4.382 miliar), tetapi pangsa realisasi PMDN Provinsi Banten terhadap total realisasi PMDN nasional mengalami penurunan dari 18,48% (2006) menjadi 11,59% (2009), bahkan sempat mencapai 3,06% tahun 2007 (BKPM, 2010a). Pada triwulan I 2010, pangsa realisasi PMDN Provinsi Banten adalah 16,92% atau senilai Rp1.131,8 miliar (BKPM, 2010b). Sementara itu, pangsa realisasi PMA Provinsi Banten terhadap total realisasi PMA nasional pada mulanya turun dari 8,48% (US\$508 juta) tahun 2006 menjadi 3,21% (US\$478 juta) tahun 2008, namun setahun

kemudian mampu bangkit mencapai 13,06% (US\$1.412 juta) (BKPM, 2010c). Memasuki triwulan I 2010, pangsa realisasi PMA di provinsi ini baru 1,51% (US\$57 juta) (BKPM, 2010d). Penurunan pangsa investasi di atas mengisyaratkan bahwa daya saing Provinsi Banten dalam menyerap investasi relatif lebih rendah dibandingkan beberapa provinsi lainnya.

Ketiga, sepanjang kurun masa 2005-2009 pangsa ekspor nonmigas Provinsi Banten dalam ekspor nonmigas nasional merosot dari 1,06% menjadi 0,54%. Penurunan pangsa ini disebabkan merosotnya nilai ekspor nonmigas dari US\$705,1 juta (2005) menjadi US\$523,3 juta (2009), atau mengalami kontraksi -4,14% per tahun. Sedangkan untuk Januari-Agustus 2010 ekspor nonmigas Provinsi Banten baru mencapai US\$318,8 juta (BPS,2010c). Penurunan pangsa ekspor nonmigas di atas mengindikasikan bahwa daya saing Provinsi Banten dalam hal ekspor nonmigas relatif lebih rendah dibandingkan beberapa provinsi lainnya.

Keempat, Provinsi Banten memang mampu menekan tingkat pengangguran dari 15,18% (656,6 ribu orang) pada Agustus 2008 menjadi 14,13% (627,8 ribu orang) pada Februari 2010 (BPS, 2010d:24-25). Akan tetapi, secara relatif tingkat pengangguran di daerah ini lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Artinya, daya saing Provinsi Banten dalam menyediakan lapangan pekerjaan relatif masih di bawah provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Kelima, selama jangka waktu 2000-2008, PDRB per kapita riil Provinsi Banten naik dari Rp5.673.003 menjadi Rp7.168.033, sedangkan PDB per kapita riil Indonesia meningkat dari Rp6.751.602 menjadi Rp9.112.051 (BPS, beberapa seri-a). Dengan demikian, laju pertumbuhan rata-rata daya beli riil penduduk Provinsi Banten masih di bawah tingkat pertumbuhan rata-rata daya beli masyarakat Indonesia, yakni 2,98% berbanding 3,82%. Artinya, daya beli penduduk Provinsi Banten masih di bawah daya beli masyarakat Indonesia, baik secara nominal maupun pertumbuhan.

Untuk mengatasi rendahnya daya saing Provinsi Banten di atas, maka daerah ini harus men-*setting* lagi strategi pembangunannya. Salah satunya adalah melalui strategi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Tulisan ini akan menganalisis pengembangan KEK di Provinsi Banten dan memaparkan kebijakan-kebijakan apa saja yang harus ditempuh untuk mewujudkan KEK tersebut.

2. BAHAN DAN METODE

Untuk merumuskan kebijakan pengembangan KEK di Provinsi Banten, maka bahan utama yang harus dijadikan sebagai kerangka pemikiran pembentukan KEK adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Di dalam undang-undang ini dikemukakan bahwa KEK adalah suatu kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu (UU 39/2009:Pasal 1). Tujuan dari dikembangkannya KEK adalah untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Lokasi yang dapat dikembangkan menjadi KEK adalah kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional (UU 39/2009:Pasal 2).

Untuk membangun suatu KEK, harus memenuhi empat kriteria berikut (UU 39/2009:Pasal 4) :

- a. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung.
- b. Pemerintah daerah yang bersangkutan mendukung KEK.
- c. Terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau jalur pelayaran internasional atau terletak pada wilayah yang memiliki potensi sumber daya unggulan.
- d. Mempunyai batas yang jelas.

Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi sebuah KEK adalah (UU 39/2009:Pasal 6) :

- a. Peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk.
- b. Rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi.
- c. Rencana dan sumber pembiayaan.
- d. Analisis mengenai dampak lingkungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial.
- f. Jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis.

Berdasarkan definisi, tujuan, kriteria, dan persyaratan di atas, maka bahan atau data lainnya yang dibutuhkan untuk mengembangkan KEK di Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

- Data mengenai perkembangan beberapa indikator ekonomimakro, seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, ekspor, ketenagakerjaan dan pendapatan per kapita.
- Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah level provinsi dan kabupaten/kota.
- Kebijakan-kebijakan lainnya dari Pemerintah Provinsi Banten mengenai dukungan pengembangan KEK.
- Analisis lokasi yang akan dikembangkan menjadi KEK.

Dengan bahan-bahan seperti di atas, maka ada beberapa metode yang akan digunakan dalam tulisan ini, yakni :

1. Metode survei, terdiri dari :

- Survei data sekunder mengenai perkembangan beberapa indikator ekonomimakro maupun hasil-hasil studi terkait. Survei data sekunder ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai potensi pengembangan KEK.
- Survei data primer, yakni dalam bentuk survei lapangan ke lokasi-lokasi alternatif yang akan dikembangkan menjadi KEK. Survei lapangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang luasan dan deliniasi kawasan yang akan dijadikan sebagai KEK.

2. Metode analisis, mencakup :

- Analisis lokasi (*location analysis*), yaitu metode analisis untuk menentukan lokasi, deliniasi, luas dan zonasi kawasan yang akan dikembangkan sebagai KEK dengan cara memanfaatkan hasil analisis GIS (*geographic information system*).
- Analisis komoditas potensial atau unggulan, yaitu berupa metode analisis peluang pasar (analisis permintaan dan penawaran) yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mengembangkan berbagai aktivitas ekonomi di KEK dan diharapkan dapat berperan menjadi motor penggerak pembangunan Provinsi Banten.
- Analisis kebijakan (*policy analysis*), yaitu sebuah metode analisis berbasis legalitas (peraturan perundang-undangan) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebijakan-kebijakan di tingkat pusat dan

daerah yang terkait dengan pengembangan KEK.

- Analisis deskriptif (*descriptive analysis*), yakni suatu metode yang bisa diterapkan untuk menganalisis pengembangan KEK secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif, analisis deskriptif dapat dilakukan dengan cara menganalisis data hasil-hasil survei yang telah diolah secara statistik, baik hasil survei primer maupun hasil survei sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Lokasi Pengembangan KEK Bojonegara

Berdasarkan konsepsi mengenai kawasan ekonomi khusus di atas, analisis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan kebijakan lainnya, serta merujuk pada hasil survei lapangan dan pemetaan, maka lokasi pengembangan KEK di Provinsi Banten yang paling sesuai adalah di wilayah Kecamatan Bojonegara, Kecamatan Pulo Ampel dan Kecamatan Kramatwatu. Selanjutnya, wilayah pengembangan KEK di ketiga kecamatan yang terletak di Kabupaten Serang ini disebut KEK Bojonegara.

Kemudian, dengan memanfaatkan hasil analisis GIS, diketahui bahwa deliniasi dan luas areal pengembangan KEK Bojonegara adalah sekitar 2.834,4 hektar, yang tersebar di (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, 2009; Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Serang No. 2 Tahun 2009) :

- Lahan milik PT Pelindo II seluas 668,87 hektar, diperuntukan untuk kawasan industri yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang industri seperti pelabuhan, *refinery*, PLTU Suralaya dan lain-lain.
- Lahan milik PT Banten Java Persada seluas 90,40 hektar, diperuntukan untuk kawasan industri.
- Lahan milik PT Jababeka Group seluas 900,00 hektar, diperuntukan untuk kawasan industri.
- Lahan di beberapa desa di Kecamatan Bojonegara dan Pulo Ampel, diperuntukan untuk kawasan industri yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang industri.

Lokasi KEK Bojonegara di ketiga kecamatan di atas dipilih karena memiliki beberapa keunggulan geoekonomi dan geostrategi, yakni :

- KEK Bojonegara berhadapan langsung dengan rute pelayaran internasional dan memiliki Pelabuhan Internasional Bojonegara.

- KEK Bojonegara mudah dicapai melalui jalan tol Jakarta–Merak dan rencananya akan dibangun jalan tol Bojonegara–Cilegon.
- KEK Bojonegara terletak di persimpangan Selat Sunda dan Laut Jawa yang kaya akan sumber daya unggulan.

Dengan demikian, lokasi pengembangan KEK Bojonegara di Provinsi Banten sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UU 39/2009.

3.2. Analisis Pengembangan Komoditas Potensial/Unggulan di KEK Bojonegara

Berdasarkan analisis peluang pasar, diperoleh hasil tentang komoditas potensial/unggulan yang dapat dikembangkan menjadi motor penggerak KEK Bojonegara, baik dalam bentuk industri maupun infrastruktur. Industri dan infrastruktur potensial/unggulan itu adalah sebagai berikut :

1. Industri-industri

a. Kilang Minyak (*Oil Refinery*)

Pesatnya perkembangan industri di wilayah Pulo Ampel, Bojonegara, dan Kramatwatu, serta wilayah lainnya di Provinsi Banten dan sekitarnya, menyebabkan permintaan akan bahan bakar minyak (BBM) menjadi makin besar dan mesti dipenuhi dalam waktu yang relatif cepat guna menjaga stabilitas operasional usaha. Karena itulah di lokasi KEK Bojonegara yang diusulkan sangat tepat dibangun industri kilang minyak.

Hingga kini sudah ada investor yang ingin membangun kilang minyak di atas lahan seluas 450 hektar dengan kapasitas 300.000 barel per hari dan diestimasi membutuhkan investasi US\$4.000 juta. Bahan bakunya berupa *Iranian Heaviest Crude* yang dipasok dari Iran, untuk diolah dengan menggunakan teknologi *VR-HCK Coker Processing*. Proses ini akan membutuhkan 200 MMSCFD gas alam dan akan menghasilkan beberapa jenis produk BBM seperti LPG, bensin, minyak tanah, solar, *fuel oil*, dan *coke*.

Selain diekspor, hasil produksi kilang minyak dapat pula memenuhi sekitar 60% kebutuhan BBM nasional, yang didistribusikan ke dan dikonsumsi oleh industri dan masyarakat di wilayah Banten, Jabodetabek, maupun Sumatera bagian selatan. Infrastruktur dan aksesibilitas untuk pendistribusian hingga kini sudah cukup memadai, baik melalui angkutan

darat, angkutan laut, maupun jalur pipa (Bojonegara-Plumpang sejauh 190 km).

b. Industri Petrokimia

Peluang pengembangan industri petrokimia berbasis olefin di KEK Bojonegara masih sangat terbuka karena secara keseluruhan industri petrokimia berbasis olefin di Indonesia masih mengalami defisit, sementara pertumbuhan permintaannya berkisar 6-8 persen setahun. Permintaan *ethylene* nasional sebesar 800.000 ton/tahun, namun baru dapat dipenuhi 550.000 ton/tahun. Permintaan *propylene* sekitar 400.000 ton/tahun, yang terpenuhi baru sebanyak 323.000 ton/tahun. Sedangkan *butadine* hingga saat ini belum dapat diproduksi di dalam negeri, sehingga harus impor 100%. Di samping karena faktor defisit, potensi pengembangan industri petrokimia di KEK Bojonegara juga didukung oleh keberadaan industri kilang minyak dan *storage*.

Dengan kondisi seperti di atas, pembangunan industri petrokimia berbasis olefin di KEK Bojonegara akan dapat mengurangi defisit nasional secara signifikan. Produsen olefin di Indonesia saat ini hanyalah PT Chandra Asri Petrochemical Center.

c. Storage BBM, produk petrokimia, LPG

Dengan adanya industri kilang minyak, maka terbuka pula peluang membangun dan mengoperasikan tangki (*storage*) untuk BBM, produk petrokimia, dan LPG (*liquid petroleum gas*). Kapasitas *storage* yang dibangun bisa mencapai kapasitas terpasang sebesar satu juta kiloliter. Investasi yang dibutuhkan adalah senilai US\$262 juta, baik untuk pembangunan *storage* maupun jaringan pipanya.

d. Industri Logam Dasar

Industri logam dasar akhir-akhir ini sulit berkembang karena kalah bersaing dengan produk impor yang harganya lebih murah. Besi beton/profil ringan, baja canai panas (*hot rolled coil*), pelat baja, dan pipa lurus/spiral merupakan lima jenis baja yang menurun produksinya setahun terakhir ini. Padahal konsumsi baja naik sekitar 5-8 persen per tahun. Karena itu, pengembangan KEK Bojonegara akan dapat mengatasi penurunan produksi maupun pengurangan impor, dengan

syarat industri logam dasar yang dibangun di kawasan ini adalah industri yang berdaya saing kuat.

e. Industri Elektronika

Permintaan domestik akan berbagai jenis produk elektronika dalam beberapa tahun terakhir meningkat sekitar 10% per tahun, dengan nilai sekitar Rp29 triliun tahun 2009. Ini merupakan peluang bagi KEK Bojonegara untuk mengembangkan industri elektronika. Industri elektronika yang paling terbuka peluangnya adalah elektronika digital, terutama televisi digital.

f. Industri-industri lainnya yang juga potensial dikembangkan di KEK Bojonegara adalah industri mineral nonlogam, telekomunikasi, permesinan, *microchip*, perakitan, konstruksi, otomotif, karet, plastik, kertas, serta usaha mikro, kecil dan menengah.

2. Infrastruktur

a. Pelabuhan Bojonegara sebagai Pelabuhan Internasional

Pelabuhan Internasional Bojonegara terletak di perairan dalam dan tenang di Teluk Banten dekat dengan Selat Sunda. Dengan lokasinya yang strategis, Pelabuhan Internasional Bojonegara dapat berperan sebagai *hub port* di wilayah Indonesia belahan barat untuk orientasi perdagangan di kawasan Asia Pasifik. Untuk itu, pelabuhan Internasional Bojonegara harus dirancang sebagai pelabuhan modern kelas dunia yang mampu melayani kapal-kapal ukuran besar. Pelabuhan ini juga sebaiknya terintegrasi dengan Pelabuhan Tanjung Priok maupun kawasan industri dan perdagangan di sekitarnya.

b. Jalan Tol Bojonegara-Cilegon

Jalan Tol Bojonegara-Cilegon akan menyambung dengan Jalan Tol Tangerang-Merak pada kilometer 87 di Interchange Cilegon Timur. Panjang jalan tol ini 15,965 km melewati sawah, tegalan, permukiman, serta memotong beberapa jalan dan sungai. Rute jalan tol ini juga bersebelahan dengan makam Gunung Santri, menghindari daerah rawan banjir Kali Gendong dan daerah genangan lainnya yang terdapat di beberapa titik di sekitar lokasi rencana pembangunan jalan tol, serta melewati rencana PLTU di Desa

Margasari dan kawasan berbukit berupa gunung batu (di STA 8.000).

Jalan Tol Bojonegara-Cilegon menjadi sangat strategis karena mendukung pergerakan peti kemas menuju ke dan dari Pelabuhan Bojonegara. Kawasan Bojonegara juga potensial untuk pengembangan pelabuhan penyeberangan guna mendukung Pelabuhan Merak yang sudah padat. Bojonegara akan kian berperan bila pembangunan jembatan Jawa-Sumatera dapat direalisasikan.

c. Infrastruktur lainnya berupa pergudangan, lapangan kontainer, pengolahan ekspor, pembangkit listrik, *waste water treatment*, tempat pembuangan sampah, rumah sakit, perkantoran, perbankan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan perumahan.

3.3. Analisis Pengembangan Zonasi Ekonomi di KEK Bojonegara

Berdasarkan hasil analisis komoditas potensial/unggulan di atas, maka pengembangan KEK Bojonegara dapat dilakukan melalui zonasi-zonasi kawasan berikut :

- Zona industri manufaktur berorientasi ekspor (petrokimia, logam dasar, mineral nonlogam, telekomunikasi, komponen elektronika, permesinan, *microchip*, perakitan, konstruksi, otomotif, karet, plastik, kertas dan lain-lain).
- Zona logistik (pelabuhan internasional, pergudangan, lapangan kontainer).
- Zona pengolahan ekspor.
- Zona energi (kilang minyak, *storage* BBM, pembangkit listrik)
- Zona pengembangan semikonduktor.
- Zona pariwisata (lapangan golf, hotel, restoran).
- Zona ekonomi lainnya (perkantoran, perbankan, perdagangan dan jasa)
- Zona perumahan dan pendukungnya (rumah sakit, ruang terbuka hijau, *waste water treatment*, tempat pembuangan sampah).
- Zona UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) dan koperasi.

3.4. Kebijakan Pengembangan KEK Bojonegara di Provinsi Banten

Merujuk pada hasil analisis lokasi, analisis komoditas potensial/unggulan dan analisis zonasi kawasan di atas, maka untuk mewujudkan pembangunan KEK Bojonegara di Provinsi Banten harus ditempuh beberapa kebijakan berikut :

1. Kebijakan Pengembangan Industri

Industri-industri yang dapat dikembangkan di antaranya adalah kilang minyak (*oil refinery*), petrokimia, storage BBM, produk petrokimia dan LPG, industri logam dasar, komponen elektronika dan industri-industri lainnya.

2. Kebijakan Pengembangan Infrastruktur

Untuk mendukung pengembangan berbagai industri potensial di atas, maka beberapa jenis infrastruktur harus dikembangkan di KEK Bojonegara di antaranya adalah Pelabuhan Bojonegara sebagai pelabuhan internasional, Jalan Tol Bojonegara-Cilegon dan beberapa infrastruktur pendukung lainnya.

3. Kebijakan Pengembangan Kelembagaan KEK Bojonegara

Sesuai dengan amanat UU 39/2009 dan Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK, maka pengembangan KEK Bojonegara memerlukan perangkat kelembagaan yang dapat mengatur semua fungsi yang diemban. Perangkat kelembagaan tersebut adalah :

- a. Pembentukan Dewan Kawasan KEK Bojonegara oleh Dewan Nasional dimana keanggotaan, tata kerja, kesekretariatan diatur dengan Keputusan Presiden.
- b. Pembentukan Administrator KEK Bojonegara oleh Dewan Kawasan dimana tugasnya (1) mengeluarkan izin usaha dan izin lainnya bagi pelaku usaha di KEK Bojonegara melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu, (2) melakukan pengawasan dan pengendalian operasional KEK Bojonegara.
- c. Pembentukan Badan Usaha Pengelola KEK Bojonegara, bisa berupa BUMN, BUMD, Koperasi, atau usaha patungan, yang ditetapkan oleh Administrator KEK Bojonegara sebagai penyelenggara kegiatan usaha di KEK Bojonegara.
- d. Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus di KEK Bojonegara (dengan Keputusan Gubernur).
- e. Pembentukan Dewan Pengupahan KEK Bojonegara (Keputusan Gubernur).

4. Kebijakan Pengembangan SDM

Kebijakan awal dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah perekrutan dan pengangkatan tenaga kerja di setiap bentuk kelembagaan KEK Bojonegara. Kebijakan berikutnya berkaitan dengan pengembangan kualitas SDM, misalnya, penyelenggaraan berbagai ragam pendidikan dan pelatihan.

5. Kebijakan Promosi dan Sosialisasi

Kebijakan promosi dan sosialisasi KEK Bojonegara dapat diwujudkan melalui pengembangan *website*, penyusunan buku profil investasi (*business plan*), pembuatan leaflet, booklet dan video, serta *expo*.

4. KESIMPULAN

Pengembangan industri, infrastruktur, kelembagaan, SDM, serta promosi dan sosialisasi merupakan *key success factors* bagi pengembangan KEK Bojonegara. Sehingga, pengembangan KEK Bojonegara diharapkan dapat meningkatkan beberapa hal berikut :

- Investasi.
- Ekspor dan sekaligus penerimaan devisa.
- Penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui alih teknologi dan sekaligus penurunan tingkat pengangguran.
- Pemanfaatan sumber daya lokal.
- Percepatan pembangunan wilayah menuju keseimbangan kemajuan Provinsi Banten dalam kesatuan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2010a. "Perkembangan Realisasi Investasi PMDN menurut Lokasi 2006-2009." Dalam <http://www.bkpm.go.id/contents/p16/PUBLIKASI++STATISTIK/17>.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2010b. "Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Menurut Lokasi - Triwulan 1 2010." Dalam <http://www.bkpm.go.id/contents/p16/PUBLIKASI++STATISTIK/17>.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2010c. "Perkembangan Realisasi Investasi PMA menurut Lokasi 2006-2009." Dalam <http://www.bkpm.go.id/contents/p16/PUBLIKASI++STATISTIK/17>.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2010d. "Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Menurut Lokasi - Triwulan 1 2010." Dalam <http://www.bkpm.go.id/contents/p16/PUBLIKASI++STATISTIK/17>.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, 2009. *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2009-2029*. Serang.

- Badan Pusat Statistik (BPS), 2010a. *Hasil Sensus Penduduk 2010 : Data Agregat per Provinsi*. Jakarta, Agustus.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2010b. *Berita Resmi Statistik : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. No. 12/02/Th.XIII, Jakarta, 10 Februari.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2010c. "Ekspor Non Migas Berdasarkan Propinsi." Diolah Kementerian Perdagangan dalam [http://www.depdag.go.id/statistik_perkembangan_n_ekspor_nonmigas_\(provinsi\)/](http://www.depdag.go.id/statistik_perkembangan_n_ekspor_nonmigas_(provinsi)/)
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2010d. *Pertumbuhan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia*. Jakarta, Agustus.
- Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa seri. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2008. *Banten Dalam Angka 2008*, Serang, September.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, 2010. *Berita Resmi Statistik : Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Triwulan IV-2009*. No. 07/02/36/Th.IV, Serang, 10 Februari.
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2009-2029.
- Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.